



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN SISTEM INFOMASI
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS
ELECTRONICAL GOVERMENT

Oleh

Tomi Luqman Hakim

Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, Indonesia

e-mail: luqmanhakimtomi@gmail.com

Abstrak

Pengembangan *e-government* dalam pelayanan administrasi kepegawaian, yang berupa pengelolaan sistem infomasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dengan menciptakan sistem pelayanan yang berbasis *on line*. SIMPEG diresmikan sejak tahun 2013 oleh Badan Kepegawaian dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sistem infomasi manajemen kepegawaian berbasis *electronical goverment*. Penelitian ini akan melihat sejauh mana sistem informasi kepegawaian SIMPEG sebagai bentuk pengembangan *e-government* yang dianalisis berdasarkan konsep pengembangan *e-government* secara teoritis. Adapun elemen pengembangan *e-government* tersebut meliputi e-leadership, infrastruktur jaringan informasi, pengelolaan informasi dan masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM). penerapan *e-government* yang berupa SIMPEG telah baik diterapkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah *e-leadership*, pengelolaan informasi serta infrastruktur jaringan informasi yang telah menyediakan seperti adanya server dan fitur *optic* yang berfungsi untuk menyimpan data dan menyediakan jaringan pengelolaan data kepegawaian.

Kata Kunci: *e-government*, SIMPEG, *e-leadership*, infrastruktur, SDM

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat diterapkan pada pelayanan fasilitas kemasyarakatan yang dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat pada bidang perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik, hingga kebijakan pemerintah. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kebijakan pemerintah ditunjukkan dengan *Electronical Government* yang merupakan sebuah kebijakan dimana pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melayani penduduknya melalui media telepon, faximile, atau e-mail/internet (Ratnasari, *et al.*, 2021).

Reformasi birokrasi ditujukan untuk mendesain ulang birokrasi yang berada dilingkungan pemerintah kearah yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan kondisi saat ini.

Melalui reformasi birokrasi, mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik, yaitu birokrasi yang bersih, bebas KKN, professional, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel sehingga birokrasi pemerintahan mampu menghasilkan dan memberikan pelayanan publik dengan prima (Safriyani, 2018).

Electronical government menawarkan pelayanan publik bisa diakses 24 jam, kapanpun, dan dari manapun pengguna berada. Salah satu fasilitas *e-government* yang telah dipergunakan hampir di seluruh Indonesia khususnya adalah SIMPEG. Program ini memungkinkan kita menghimpun data tiap PNS, merekam perubahan yang terjadi, serta menyimpannya dalam satu himpunan data (*data base*). Tujuan sistem data base meliputi penyediaan sarana akses yang fleksibel,



pemeliharaan integritas data, proteksi data dari kerusakan, dan penggunaan yang tidak legal serta penyediaan sarana untuk penggunaan secara bersama (*share*). SIMPEG berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda menyebutkan bahwa SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) adalah sistem informasi terpadu yang terdiri atas perangkat lunak; perangkat penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, bergantung, dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian (Djawa dan Puspasari, 2018).

SIMPEG adalah suatu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk mengolah data, manajemen, dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah. SIMPEG adalah suatu program yang dibuat dengan tujuan membantu pengelolaan informasi data kepegawaian yang valid, dan mutakhir. Denaya dan Djumiati (2018) menyatakan bahwa SIMPEG adalah sebuah sistem manusia dan mesin yang terpadu, untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.

Implementasi pemerintahan elektronik (*e-government*) di Indonesia dan apa yang telah dicapai selama ini tentunya membutuhkan perubahan dari kedua sisi. rencana implementasi dan filosofi *e-government*. Keterlambatan kemajuan *e-government* hanya akan memastikan negara ini jauh dari mengubah nilai-nilai, meningkatkan standar pelayanan publik untuk semua, dan akhirnya mencegah kesejahteraan masyarakat (Baeuo *et al.*, 2016).

Banyak manfaat yang dapat diperoleh melalui implementasi *e-government*, salah satunya yaitu dapat menangani kebutuhan informasi manajemen pemerintah meningkatkan proses administrasi dan memastikan akuntabilitas publik. Proses

pengambilan keputusan yang bertahan lama, memadai, terstruktur dengan baik pengetahuan juga akan memungkinkan lembaga pemerintah untuk melakukan tugasnya secara efisien dan akurat (Witarsyah *et al.*, 2017).

Beberapa hambatan yang ditemui dalam implementasi *e-government* pada beberapa negara diantaranya adalah kekurangan infrastruktur teknis, modal keuangan, dan kapasitas administrasi publik telah membatasi upaya pengembangan *e-government* negara, inovasi dalam program dan teknologi akan membantu menyelesaikan banyak hambatan ini. Layanan *e-government* selain menawarkan lebih besar transparansi dengan mengubah fungsi pemerintahan menjadi *e-government* (Griffin & Trevorrow, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis *electronical government*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah dapat terselesaikan. Pendekatan ini

merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu (Cresswell, 2013:20).

Objek penelitian ini adalah 3 (tiga) pegawai yang terdiri dari 1 orang pegawai Diskominfo Kabupaten Banyuas, 1 orang pegawai BKD Kabupaten Banyumas dan 1 orang dari pegawai BKPSDM Kabupaten Banyumas. Fokus penelitian ini adalah pengembangan *e-Government* melalui sistem aplikasi kepegawaian SIMPEG. Lokasi penelitian adalah OPD Kabupaten Banyumas. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.



informasi baik itu dalam konteks sistem kerja dalam rangka pencapaian tujuan tertentu atau organisasi, sehingga dalam hal ini terdapat perpaduan antara teknologi informasi dengan proses pengambilan keputusan tentang kepemimpinan.

Penerapan SIMPEG yang berbasis on line diterapkan sejak tahun 2013 sehingga sampai saat ini SIMPEG terus menerus melakukan perbaikan. Secara umum, SIMPEG dapat meningkatkan kualitas SDM dengan penyediaan informasi yang akurat dan efisien sehingga pengambilan keputusan dapat secara objektif dilakukan. Secara strategis, aplikasi SIMPEG merupakan salah satu sistem yang bergerak dibidang kepegawaian dan mampu menumbuhkan pengetahuan memelihara, memperkaya, dan menyediakan pengetahuan dibidang kepegawaian kepada pihak- pihak yang membutuhkan sebagai basis pengambilan keputusan yang akurat pada saat yang tepat.

2. Infrastruktur Jaringan Informasi

Penerapan E-government tidak terlepas dari sarana dan prasarana seperti infrastruktur jaringan informasi yang menjadi sarana penyediaan jaringan Internet terutama untuk melakukan pengelolaan data agar kualitas layanan lebih baik dan cepat. Tujuan pengembangan E-Government salah satunya meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat, terutama dalam bidang konsistensi (tidak pandang bulu), kecepatan layanan, kepastian penyelesaian layanan, dan kecepatan pemrosesan data. Jika dikaitkan dengan hasil observasi dilapangan bahwa di badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sudah memberikan pelayanan yang baik terutama dalam pengelolaan SIMPEG yang telah dilakukan secara on line yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Pemanfaatan dan pengembangan E-Government sangat ditentukan dengan adanya dukungan teknologi yang handal pada setiap unit kerja, seperti pengalaman penggunaan komputer, banyaknya komputer yang tersedia,

ketersediaan fasilitas jaringan intranet dan internet, dan server (Habibullah, 2016).

Menurut Hardiansyah (2017) Infrastruktur Jaringan Informasi merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses. Jika dikaitkan dengan penerapan E-Government terutama dalam penggunaan aplikasi SIMPEG pada OPD Kabupaten Banyumas ini sudah cukup baik.

Infrastruktur Jaringan Informasi untuk membangun atau menerapkan sebuah E Government itu tidak bisa dilakukan hanya satu Organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga harus ada kerjasama yang dilakukan antara OPD lainnya. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian yang mana yang menyediakan aplikasi ini adalah badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, tetapi mengenai infrastruktur jaringan informasi dan koneksi internet di setiap OPD dikelola oleh dinas komunikasi dan informatika. Infrastruktur jaringan informasi yang dilakukan oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sampai saat ini terus melakukan upaya percepatan.

Infrastruktur jaringan informasi salah satunya yaitu bertujuan untuk menerapkan SIMPEG yang dilakukan secara on line sejak tahun 2013, infrastruktur jaringan informasi tiap tahun melakukan perbaikan. Sehingga semua OPD di Indonesia, kecamatan dan pengelolaan data kepegawaian lainnya dapat mengangsesnya. Sehingga infrastruktur jaringan informasi sudah disediakan seperti server besar dan fiber optic untuk mengelolah data-data pegawai setiap OPD di Kabupaten Banyumas.

3. Pengelolaan Informasi

Menurut Hardiansyah (2017) Pengelolaan Informasi merupakan aspek yang berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan,



sampai penyaluran dan distribusinya. Pengelolaan informasi yang dilakukan sudah sesuai dengan standart pelayanan dengan cara selalu melakukan up datting jika terdapat perubahan terkait dengan data-data pegawai sedangkan kualitas pengelolaan informasi dapat dilihat dari penilaian yang dilakukan di website tiap OPD terdapat polling penilaian atas kualitas pengelolaan informasi. Untuk itu terdapat transparansi penilaian yang dilakukan baik semua pegawai yang ada di tiap Kabupaten, masyarakat juga dapat mengaksesnya dan menilai bagaimana kualitas pelayanan saat pengelolaan informasi.

Keamanan teknologi jaringan komputer sangat dibutuhkan oleh organisasi dalam membangun sistem informasi secara terintegrasi karena setiap jaringan komputer memberikan perlindungan terhadap data. Keamanan untuk mengelola informasi data kepegawaian terutama pengelolaan SIMPEG ini disana terdapat server yang sudah dikelola secara mandiri pada tiap OPD, artinya setiap OPD dapat mengelola data kepegawaian jika ada suatu perubahan data maka dapat secara langsung melakukan up datting data, sehingga tidak monoton ke satu pihak saja.

Berdasarkan distribusi persebaran pengelolaan informasi sudah berjalan dengan baik artinya dalam mengaplikasikan suatu SIMPEG tersebut sudah difasilitasi oleh badan atau dinas terkait serta kerjasama yang dilakukan oleh dinas komunikasi dan informatika sebagai penyedia layanan internet. Aplikasi SIMPEG ini dapat dilakukan dimana saja terutama di daerah kepulauan disana telah disediakan satelit oleh DISKOMINFO. Terkait dengan sasaran dalam pengelolaan SIMPEG sudah terealisasi yaitu dengan menyediakan suatu informasi untuk melakukan secara cepat, tepat, akurat. Untuk menetapkan sasaran pendukungnya adalah mereka yang mempunyai relevansi hubungan khusus dengan penyediaan informasi dan seluruh OPD.

4. Masyarakat dan Sumber Daya manusia

Masyarakat dan Sumber Daya Manusia merupakan aspek ini berkaitan dengan difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada seluruh pegawai melalui penyuluhan dan pelatihan.

Penerapan SIMPEG ini dilakukan dengan berbasis on line sehingga tidak juga memerlukan terlalu banyak operator atau pengelola pegawai. Sumber daya manusia yang terdapat di bidang data dan informasi melakukan suatu inovasi yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi tentang penerapan kepada para operator atau pejabat pengelolaan data kepegawaian pada tiap kabupaten. Salah satu sosialisasi yang dilakukan tentang informasi melalui Web portal serta acara rekonsiliasi. Sosialisasi rutin ini dilakukan biasanya 2 kali dalam setahun, tetapi jika tidak rutin hampir setiap hari para operator berkunjung dan melakukan pendampingan terkait dengan kesulitan saat pengelolaan SIMPEG ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis electronic government yang ditinjau dari sejumlah aspek yaitu E-Leadership merupakan Suatu sistem pola kepemimpinan yang dilakukan melalui integritas antara makna E-Leadership atau kepemimpinan itu sendiri dengan teknologi informasi baik itu dalam konteks sistem kerja ataupun dalam konteks peningkatan produktivitas kerja dalam rangka pencapaian tujuan tertentu atau organisasi dan mengenai proses pengambilan keputusan. Infrastruktur jaringan informasi yang disediakan oleh Pemerintah sudah cukup baik, infrastruktur tidak terlepas dengan kerja sama setiap lembaga atau instansi salah satu yang menyediakan infrastruktur jaringan informasi adalah dinakomunikasi dan informatika



.....

sedangkan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia hanya menyediakan aplikasi SIMPEG saja yang akan di kelola oleh lembaga, kecamatan dan lain sebagainya untuk mengelola data pegawai di seluruh wilayah kabupaten. Pengelolaan informasi dalam penerapan SIMPEG dilakukan melalui up dating data, serta keamanan yang dilakukan selama ini sudah cukup baik yang disediakan server besar untuk penyimpanan data dan keamanan tentang pengelolaan data kepegawaian di tiap kabupaten. Masyarakat dan sumber daya manusia kaitannya dengan penerapan SIMPEG ini sebagai salah faktor keberhasilan dalam suatu organisasi, dengan adanya sumber daya manusia sebagai operator untuk menjalankan aplikasi SIMPEG.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Almarabeh, T. 2014. A General Framework for EGovernment: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success. *European Journal of Scientific Research*, Vol 39 No. 1 Hal, 29-42.
- [2] Avolio, B. J., Kahai, S., & Dodge, G. E. (2020). Eleadership: Implications for theory, research, and practice. *The Leadership Quarterly Journal* Vol.11 No. 4.
- [3] Baeuo, M. O., Ab. Rahim, N. Z. B., & Alaraibi, A. A. M. (2016). Technology Aspects of E-Government Readiness in Developing Countries: A Review of the Literature. *Computer and Information Science* Vol. 9 No. 2.
- [4] Cresswell, J. W. 2014. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [5] Denaya, A. dan Djumiarti, T. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) di BKD Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Public Policy And Management* Vol. 7 No. 4.
- [6] Djawa, M. K. dan Durinta Puspasari. 2015. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Untuk Mendukung E-Government Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pndidikan Administrasi Perkantoran* Vol. 3 No. 3.
- [7] Griffin, D., & Philippa Trevorrow. (2014). Developments in E-government. *In Administrative Justice in Context*. IOS Press.
<https://doi.org/10.5040/9781472560759.c-h-003>
- [8] Habibullah, A. (2020). Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol. 23, No. 3.
- [9] Hardiansyah. (2017). *Kualitas Pelayanan Publik*. Jogyakarta: Gava Medias.
- [10] Ratnasari, M. O. B., Irwan N., Firda H. (2022). Analisis Pengembangan E-Government pada Layanan Administrasi Pemerintahan (Studi pada “SURADI” di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* Vol. 8. No. 1.
- [11] Safriyani. I. (2018). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian: Studi di BKPSDM Kabupaten Sumenep. *Journal of Public Sector Innovations*, Vol. 3, No. 1.
- [12] Sintiya E. S., Tony D. S., Ari C.P., (2020). Electronics-Leadership (E-Leadership) dalam Sektor E-Government: Literature



Review. *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi* Vol. 6 No. 3.

- [13] Witarsyah, D., Sjafrizal, T., Fudzee, M. F. M., & Salamat, M. A. (2017). The critical factors affecting e-government adoption in indonesia: A conceptual framework. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology* Vol. 7 No. 1 hal, 160–167. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.7.1.1614>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN